



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKj-PD) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKj-PD) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dapat disusun secara optimal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun sebab-sebab dari suatu kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) merupakan laporan tahunan yang menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi dan indikator kinerja kegiatan/program, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja secara keseluruhan, serta merupakan pembandingan capaian kinerja tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan merencanakan strategi peningkatan kinerja tahun berikutnya, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pertanggungjawaban, manajemen sumber daya aparatur dan aset, khususnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Pebruari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720719 200312 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja setiap instansi pemerintah adalah kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis yang dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan *output* kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD). LKj-PD dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setiap setahun sekali.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) adalah pengukuran kinerja, dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan lampiran-lampiran yang mendukung, antara lain Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun sebagai pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Untuk mengukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilakukan pengukuran melalui instrumen indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dari indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana adalah sebesar 101,18%. Untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim AKIP

Inspektorat Daerah, namun dalam melaksanakan kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyerap anggaran sebesar 92,57%.

Analisis atas capaian kinerja tersebut akan dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, sebagai upaya berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, diharapkan sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyusun strategi perencanaan kinerja yang lebih matang agar pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Probolinggo, Pebruari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720719 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	16
1.3. Landasan Hukum	16
1.4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 20
2.1. Perencanaan Strategis	20
2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	21
2.1.2. Tujuan dan Sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029	21
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
2.3. Sasaran Strategis, Program, Kegiatan.....	23
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	25
2.5. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025.....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	29
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPJMD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.....	30
3.1.3. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
3.2. Realisasi Anggaran	36
3.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	37
3.4. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya.....	40
3.5. Inovasi.....	41
 BAB IV PENUTUP	 44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai BPBD.....	11
Tabel 2	Aset yang dimiliki BPBD.....	12
Tabel 3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	18
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	21
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD 2025-2029.....	21
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23
Tabel 7	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan.....	24
Tabel 8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	26
Tabel 9	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025.....	27
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Utama	29
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD (Periode Renstra).....	30
Tabel 14	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	32
Tabel 15	Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kinerja	37
Tabel 16	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	37
Tabel 17	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Probolinggo.....	10
Gambar 2	Platform Situasi Slaga Bencana (FORMASI SIGAB).....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun sebab-sebab dari suatu kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo berisi pelaporan atas pencapaian pelayanan organisasi dan *output* yang dihasilkan berupa capaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran pembangunan sekaligus sasaran strategis yang diperbandingkan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, maka analisis kinerja diperlukan dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan masa pemerintahan, dimana terdapat pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2025-2029. Dengan adanya pelantikan tersebut, selanjutnya disusun RPJMD dan Renstra PD Periode Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Probolinggo. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dokumen tersebut juga menjadi tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan

menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XXIX pasal 412 pada ayat (1) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas:

- a. Menyusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Badan membawahi Kepala Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah adalah unsur yang terdiri dari Instansi dan Tenaga Profesional/Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan, mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
- b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;

- c. Perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian dan pembinaan terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

3. Unsur Pengarah, terdiri dari:

- 1. Instansi;
- 2. Profesional/Ahli.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;

- 2) Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - 3) Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - 4) Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - 5) Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
 - 6) Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 7) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
- 1) Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 2) Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 4) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - 6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana. Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
6. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - c. Pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulanagan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
 - d. Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - e. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
 - f. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat Eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- j. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- k. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

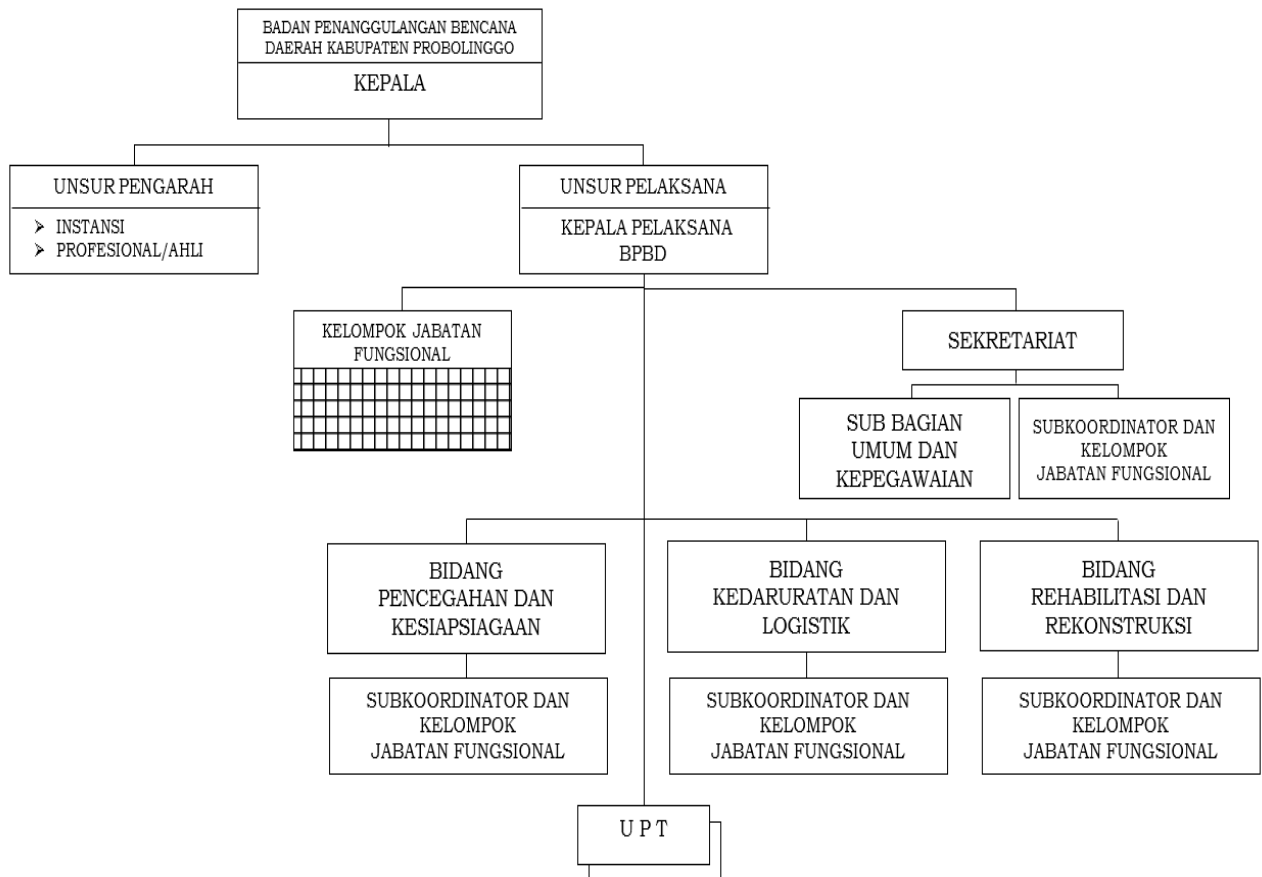
9. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) huruf i, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 MEI 2022

Gambar. 1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo



B. Sumberdaya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat Fungsional, Staf PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Staf Pusdalops dan TRC. Adapun sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 sebanyak 62 orang, terdiri dari:

Tabel. 1
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo

No.	Uraian	Jumlah
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin :	
	- Laki-laki	52
	- Perempuan	10
2.	Berdasarkan Status Kepegawaian :	
	- PNS	15
	- CPNS	1
	- PPPK	2
	- PPPK Paruh Waktu	37
	- Tenaga Alih Daya	7
3.	Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :	
	- S2	7
	- S1	27
	- D3/DIV	1
	- SMA/SMK	25
	- SMP	2
4.	Berdasarkan Jenjang Eselon :	
	- Eselon II	1
	- Eselon III.b	4
	- Eselon IV/Pejabat Fungsional	4
	- Staf PNS/Non Eselon	53

No.	Uraian	Jumlah
5.	Berdasarkan Pangkat/Golongan :	
	- Pembina Tingkat I	1
	- Pembina	3
	- Penata Tingkat I	5
	- Penata	4
	- Penata Muda	1
	- Pengatur Tingkat I	1
	- Pengatur	0

Sumber Data : Data Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

C. Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 27 Kota Probolinggo, memiliki 3 (tiga) bangunan utama dan 1 (satu) mushola dengan total luas bangunan 90% dari luas tanah yang ada. Sementara itu, untuk sarana prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 2
Aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo

No.	Nama Barang	Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit)
1	2	3
1	Alat Pengangkat Lain - Lain	1
2	Portable Compressor	1
3	Portable Generating Set	13
4	Portable Water Pump	2
5	Pompa Tangan	4
6	Pompa Air	2
7	Pompa Lain-Lain	4
8	Mesin Bor Tanah	1
9	Station Wagon	1
10	Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
12	Pick Up	1
13	Angkutan Barang Lain-lain	1
14	Sepeda Motor	16

No.	Nama Barang	Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit)
1	2	3
15	Mobil Tangki Air	6
16	Lain-lain kendaraan tak bermotor angkutan barang	1
17	Perahu Penumpang	2
18	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1
19	Mesin Kompresor	1
20	Lain-lain Perkakas Standar (Standart Tool)	1
21	Mesin Gergaji	10
22	Gergaji Chain Saw	3
23	Lain-lain Perkakas Bengkel Service	9
24	Tool Kit Set	17
25	Tool Kit Box	7
26	Kunci Pipa	7
27	Perkakas Standar (Standart Tool) Lain-Lain	25
28	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	14
29	Kunci Pas	14
30	Global Positioning System	7
31	Lain-lain Alat Ukur Universal	1
32	Garu	10
33	Alat Laboratorium Lain-Lain	1
34	Lemari Besi/Metal	6
35	Lemari Kayu	15
36	Rak Besi	11
37	Rak Kayu	1
38	Filing Cabinet Besi	15
39	Filing Cabinet Kayu	5
40	Brandkas	1
41	Locker	1
42	Lemari Sorok	4
43	Lemari Kaca	5
44	CCTV - Camera Control Television System	2
45	White Board	3
46	Alat Penghancur Kertas	2
47	Globe	1
48	Mesin Absensi	2
49	Display	1
50	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
51	Brand Kas	2
52	Meja Kerja Besi/Metal	25
53	Meja Kerja Kayu	32

No.	Nama Barang	Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit)
1	2	3
54	Meja Rapat	7
55	Meja Panjang	2
56	Meja 1/2 Biro	6
57	Kursi Rapat	41
58	Kursi Tamu	1
59	Kursi Putar	23
60	Bangku Tunggu	4
61	Kursi Lipat	22
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
63	Lemari Es	1
64	A.C. Window	21
65	A.C. Split	1
66	Kipas Angin	6
67	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
68	Treng Air/Tandon Air	20
69	Televisi	10
70	Loudspeaker	1
71	Sound System	2
72	Microphone	2
73	Tangga Aluminium	1
74	Gordyin/Kray	21
75	Lampu	3
76	Handtruck Trolly Plastics	13
77	Alat Pemadam/Portable	6
78	Pompa Kebakaran/Portable	8
79	Pakaian Panas/Lengkap	10
80	Alat Pembantu Kebakaran	37
81	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran	20
82	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
83	Meja Rapat Pejabat Eselon II	3
84	Meja Operator	6
85	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
87	Kursi Kerja	42
88	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2
89	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3
90	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1
91	Camera Electronic	3
92	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1

No.	Nama Barang	Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit)
1	2	3
93	Lensa Kamera	1
94	Layar Film/Projector	2
95	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
96	Telephone (PABX)	1
97	Pesawat Telephone	1
98	Pager	2
99	Handy Talky (HT)	28
100	Facsimile	3
101	Lain-lain Alat Komunikasi Radio SS	1
102	Unit Tranceiver VHF Portable	15
103	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain	3
104	Wireless Amplifier	1
105	Slide Projector (Lapangan)	1
106	Peralatan Antena UHF Lain-Lain	3
107	Utility Trolly	8
108	Tablet Machine	1
109	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	11
110	Lain-Lain Alat Laboratorium lain (Alat Tes HbA1C)	20
111	Katrol	1
112	Sekop	10
113	Alat Khusus Meteorologi	7
114	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	38
115	Lain-lain Alat Keamanan	82
116	P.C Unit	17
117	Lap Top	22
118	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30
119	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
120	External/Portable Hardisk	10
121	Hard disk Eksternal	9
122	Server	3
123	KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	2
124	Masker Debu	15
125	Helmet	15
126	Alat pelindung lainnya lainnya (dst)	47
127	Life Jacket	10
128	Tenda	17
129	Mesh Bag	10
130	Genset	20
131	Rambu Jalan	95

No.	Nama Barang	Jumlah Aset dan Sarpras yang dimiliki (unit)
1	2	3
132	Rambu Informasi Parkir Elektronik (Pendukung TPE)	40
133	Alat Dayung	5
134	Lain-Lain Peralatan Olahraga Lainnya	1

Sumber Data : Daftar BMD pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah :

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Probolinggo No. 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.4. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Tabel. 3
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya sinergitas dan komitmen pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam urusan bencana	1. Keberadaan aturan/ mekanisme dalam mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih terbatas	1. Terbatasnya regulasi-regulasi terkait kebencanaan
			2. Belum terbentuknya TRC Multisektor
		2. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan mitigasi bencana	1. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan jenis ancaman bencana yang beragam
			2. Sosialisasi mitigasi bencana belum tersebar merata di daerah rawan bencana
			3. Terbatasnya pelatihan-pelatihan kebencanaan bagi aparatur maupun masyarakat
			4. Belum meratanya pembentukan destana/ pembentukan pengurangan risiko bencana berbasis komunikasi terutama pada daerah rawan bencana yang tinggi resikonya
			5. Belum tersedianya bangunan-bangunan yang aman bencana
			6. Terbatasnya dana mitigasi sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		3. Belum optimalnya penanganan darurat bencana	1. Luasnya jangkauan wilayah dan infrastruktur yang kurang mendukung sehingga mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam penanganan/penyaluran bantuan
			2. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap penanganan darurat bencana masih terbatas
			3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana dan penanganan layanan komunikasi kedaruratan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat
		4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah bencana	1. Adanya paradigma bahwa pemulihan kawasan pembangunan fisik telah ditangani oleh dinas terkait
			2. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tidak semua kerusakan pascabencana bisa tertangani

Sumber Data : Bidang I, II dan III pada BPBD Kabupaten Probolinggo

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Didalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo masuk ke dalam Misi ke-5 yaitu SAE Sosial **“Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas”** dengan Tujuan **Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah Berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal**. Untuk mencapai tujuan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas**. Dalam mendukung sasaran tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya dalam pencapaian Indikator Sasaran ke-2 yaitu **Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**.

Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra RPJMD 2025-2029

Berikut Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesetaraan Gender dan Kearifan Lokal	Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,60	

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Probolinggo 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5
Tujuan dan Sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Ketahanan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	86,61	87,17	87,83	88,94	89,50	90,06	
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Setiap organisasi perangkat daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Tabel. 6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN (SUMBER DATA DAN DASAR REGULASI)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ $Y(j)$ = Indeks Trantibumlinmas Sub Kab/kota a_i = bobot masing-masing indikator X_{ij} = Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kab/kota	Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan Tata Kelola penanggulangan bencana berdasarkan pilar dan indikator yang sudah ditentukan. <i>Dasar Regulasi:</i> KEPMENDAGRI Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil atas evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1)	Nilai SAKIP tahun n - Nilai SAKIP tahun n-1 ----- x 100 % Nilai SAKIP tahun n-1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah <i>Dasar Regulasi:</i> Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3 Sasaran Strategis, Program, Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 7
Sasaran Strategis Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran.

Berikut Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 8
Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target tribulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	86,61	-	-	-	86,61
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Persen	0,51%	-	-	-	-

2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah (pimpinan instansi yang lebih rendah) dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah (pimpinan instansi yang lebih tinggi) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Perjanjian Kinerja berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2025 antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel. 9
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	86,61
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0,51%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET. (SUMBER ANGGARAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.100.751.722	Pajak Rokok, Silpa, DAU Pendidikan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.256.299.175	Pajak Rokok, Silpa, DAU, PAD, Dana Bagi Hasil
	Jumlah	Rp 5.357.050.897	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran capaian atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo tahun 2025. Sedangkan capaian indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik	
2.	75 – 100 %	Baik	
3.	50 – 74 %	Cukup	
4.	≤ 50 %	Kurang	

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo digunakan untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 11
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	86,61	87,64	101,18 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0,51%	0,38%	74,51%	Cukup

Sumber data : Data diolah

3.1.1 Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Untuk tahun 2025, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dapat diperbandingkan antara target dengan realisasi kinerjanya dari Indikator Kinerja Utama berikut ini:

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3		4	5	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	86,61	87,64	101,18 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Persentase	0,51%	0,38%	74,51%

Sumber data : Data diolah

Berdasarkan dari hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2025 seperti pada tabel diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

Ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 87,64 dengan tingkat capaian kinerja 101,18 % dengan kategori Sangat Baik.

2. Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dapat diketahui dari realisasi pada tahun 2025 sebesar 0,38% dari target yang di tetapkan, sehingga mendapat capaian kinerja sebesar 74,51%.

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPJMD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (periode Renstra) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
(Periode Renstra)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				Target Akhir RENSTRA	
				2025	2026	2027	2028	2029	CAPAIAN 2025 TERHADAP TARGET 2029
1	2	3	4	5	6	7		8	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	87,64	-	-	-	89,50	97,92
2	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,38	-	-		0,58	65,51

Sumber data : data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra dapat diketahui bahwa Capaian Persentase pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana yaitu 97,92%. Hal ini masih dapat diterima mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kinerja untuk mengejar target yang belum tercapai tahun 2025.

3.1.3 Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berisi penjelasan identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut. Dalam menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah direncanakan sebelumnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 14
Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi/Inovasi	Program Kegiatan Penunjang Alternatif
1	2	3	4	4	5	6
1.	Terlayannya seluruh warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	Tersedianya rambu-rambu bencana, papan informasi atau papan himbauan	-	Terlalu luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo yang memiliki multi risiko bencana	Memperbanyak pemasangan rambu-rambu bencana terutama pada daerah/kawasan yang berisiko tinggi	Sosialisasi KIE pada daerah rawan bencana
		Informasi rawan bencana tersebar melalui publikasi (media cetak dan radio) dan melalui sosial media (WA Grup, IG, Facebook, Twitter dll)	-	Tidak semua daerah bisa dijangkau oleh internet dan tidak semua warga memiliki hp android	Mengoptimalkan manfaat sosial media dalam penyebaran informasi kebencanaan	Sosialisasi KIE pada daerah rawan bencana
2.	Terlayannya seluruh warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terselenggaranya pelatihan, sosialisasi dan simulasi kebencanaan kepada warga negara (faskes, faskid) di kawasan rawan bencana	-	Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kebencanaan bagi aparat dan masyarakat	Peningkatan kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana dengan potensi/resiko tinggi kepada masyarakat pada tahap sebelum, saat darurat dan pasca terjadi bencana	Sosialisasi KIE Rawan Bencana, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
			-	Minimya kualitas dan kuantitas aparat yang memiliki sertifikat keahlian dalam urusan bencana	Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan Risiko Bencana misalnya dengan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Pembentukan FPRB sampai tingkat Desa, Pembentukan Destana dan Kencana

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi/Inovasi	Program Kegiatan Penunjang Alternatif
1	2	3	4	4	5	6
			-		Memaksimalkan peran TRC dan Pusdalops serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penanggulangan Bencana dengan mengikuti bimtek dan diklat kebencanaan	
3.	Tertolongnya seluruh korban bencana maupun warga yang terdampak	Sistem komando yang cepat dan tepat	-	Luasnya jangkauan wilayah dan infrastruktur yang kurang mendukung sehingga mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam penanganan/ penyaluran bantuan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
		Respon time kurang dari 24 jam	-	Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam penanganan bencana	Peningkatan dan optimalisasi dukungan logistik kebutuhan dasar korban bencana sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1x24 jam	
		Adanya dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan darurat bencana	-	Terbatasnya sarpras penanganan darurat bencana	Melakukan upaya-upaya diplomasi dengan stakeholder lain melalui legitimasi hukum dalam rangka peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal penanggulangan bencana	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	-	Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan (menjadikan sungai tempat pembuangan sampah dan penebangan liar)		Penyediaan Logistik Penyelamatan bagi Korban Bencana

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi/Inovasi	Program Kegiatan Penunjang Alternatif
1	2	3	4	4	5	6
		Dukungan dari Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Dana Siap Pakai (DSP)	-	Belum optimalnya koordinasi internal dalam menganalisa penghitungan kebutuhan baik sarpras peralatan penanggulangan bencana maupun logistik	Mengoptimalkan koordinasi internal dalam menganalisa penghitungan kebutuhan baik sarpras peralatan penanggulangan bencana maupun logistik	
		Adanya dukungan logistik dan sarpras dari BPBD Provinsi, BNPB dan CSR	-	Kurangnya pengetahuan masyarakat atas keberadaan BPBD dalam perannya memegang Komando Penanganan Bencana		
4.	Perencanaan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma organisasi	Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Adanya kebijakan atau aturan yang harus segera diimplementasikan sehingga kegiatan yang telah disusun pada tahap perencanaan kadangkala berubah di akhir penganggaran (penetapan APBD)	Adanya keterbatasan anggaran sehingga penyusunan dokumen-dokumen kebencanaan tidak dilakukan tepat waktu	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran dan program kegiatan yang tepat sesuai dengan tuntutan organisasi	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana, Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi per Jenis Ancaman Bencana, Dokumen Rencana Penyusunan Kedaruratan Bencana

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil, jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat serta prasarana dan sarana operasional. Selain itu BPBD Kabupaten Probolinggo juga didukung oleh BNPB dan BPBD Provinsi berupa pemberian bantuan logistik antara lain tenda, terpal, makanan siap saji, lauk pauk, velvet, tandon air, jerigen, tangki air, kompor gas, paket kebersihan, *family kids*, sandang pria dan wanita, jas hujan, selimut, matras dan lain-lain. Dibalik keberhasilan yang telah dicapai, BPBD Kabupaten Probolinggo juga mengalami beberapa kendala dan permasalahan antara lain terlalu luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo yang memiliki multi risiko bencana, terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat, infrastruktur yang kurang mendukung sehingga mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam penanganan/penyaluran bantuan, terbatasnya sarpras penanganan darurat bencana.

Dalam meningkatkan pelayanan bencana, fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan. Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana ketersediaan sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah gudang logistik yang belum berstandar sesuai ketentuan BNPB, lampu cordless (yang dipergunakan untuk membantu penerangan saat operasi penanggulangan bencana pada malam hari), kamera drone yang diperlukan untuk melakukan pemetaan bidang kebencanaan (pemetaan KRB, area terdampak, SAR dll), perahu karet, *water treatment*, peralatan SAR, kendaraan *rescue*, Sistem Peringatan Dini untuk semua jenis ancaman bencana masih terbatas, rambu-rambu bencana, papan informasi dan himbauan, spanduk, baleho belum merata terpasang di seluruh daerah rawan bencana dan lain-lain.

Solusi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo untuk mengurangi kendala dan permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Probolinggo untuk mengalokasikan anggaran yang tepat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dan upaya pemenuhan tenaga ahli dan trampil yang dapat dilakukan dengan membentuk Tim Teknis penyusunan

dokumen penanggulangan bencana yang anggotanya dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Bagian Hukum Setda, Unsur Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya untuk bersama-sama menyusun dokumen-dokumen Penanggulangan Bencana seperti : KRB, RPB, dan dokumen penanggulangan bencana lainnya yang telah habis masa berlakunya hingga menjadi legitimasi hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo.

3. Melakukan upaya-upaya diplomasi dengan stakeholder lain melalui legitimasi hukum dalam rangka peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam hal penanggulangan bencana.
4. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan Risiko Bencana misalnya dengan alokasi bantuan pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana.
5. Memaksimalkan peran TRC dan Pusdalops serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penanggulangan Bencana dengan mengikuti bimtek dan diklat kebencanaan.
6. Melakukan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/resiko tinggi.
7. Memberikan sosialisasi, informasi, edukasi dan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di desa pada tahap sebelum, saat dan pasca terjadi bencana

3.2 Realisasi Anggaran

Berisi anggaran yang direncanakan (RKA/DPA) dan realisasinya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Realisasi anggaran dari seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebesar 92,57%. Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 15
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Rp 1.100.751.722	Rp 1.068.589.134	97,08 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Rp 4.256.299.175	Rp 3.890.415.862	91,40%

Sumber data : Data diolah

3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel. 16
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA				OUTPUT / KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.256.299.175	3.890.415.862	91,40	PAD, Silpa, DAU, DBH, Pajak Rokok	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	0,51	-	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.420.000	7.358.700	99,17	Silpa	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100%	100%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.420.000	7.358.700	99,17	Silpa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.524.427.273	2.352.766.711	93,20	DAU, Silpa	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.516.782.273	2.345.152.631	93,18	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.645.000	7.614.080	99,60	Silpa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA				OUTPUT / KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAI AN (%)	SUMBER DANA	URAIAN	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.154.110	268.478.547	73,93	PAD, Silpa, DAU, Pajak Rokok	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.778.500	69.761.830	97,19	PAD, Silpa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.300.000	1.221.000	93,92	Pajak Rokok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.075.610	197.495.717	68,08	PAD, Silpa, DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lapo ran	12 lapo ran	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.115.792	969.215.261	92,21	PAD, DBH, Silpa, Pajak Rokok	Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 lapo ran	12 lapo ran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	118.891.000	94.145.845	79,19	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapo ran	12 lapo ran	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.224.792	875.069.416	93,87	DBH, Silpa, Pajak Rokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapo ran	12 lapo ran	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.182.000	292.596.643	94,33	PAD, Silpa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	73 Unit	73 Unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.982.000	265.856.641	94,28	PAD, Silpa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	42 Unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.200.000	26.740.002	94,82	Silpa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.100.751.722	1.068.589.134	97,08	DAU, Silpa, Pajak Rokok	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100.00	100.00	100
						Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100.00	100.00	100
						Persentase Penanganan Pasca Bencana	100.00	100.00	100
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	56.965.750	51.918.360	91,14	DAU, Silpa	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100.00	100.00	100
	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	56.965.750	51.918.360	91,14	DAU, Silpa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	260 orang	260 orang	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA				OUTPUT / KELUARAN			
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAI AN (%)	SUMBER DANA	URAIAN	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	666.301.500	643.864.025	96,63	Pajak Rokok, DAU Pend.	Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.00	100.00	100
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	111.301.500	108.918.000	97,86	Pajak Rokok	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	555.000.000	534.946.025	96,39	DAU Pend.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di awasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 kawasan	1 kawasan	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	254.236.472	251.963.679	99,11	Silpa, Pajak Rokok	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	100.00	92.80	100
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	218.767.640	217.543.055	99,44	Silpa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50.000 orang	50.000 orang	100
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.468.832,00	34.420.624	97,04	Pajak Rokok	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10.000 orang	10.000 orang	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	123.248.000	120.843.070	98,05	Silpa, DAU, Pajak Rokok	Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana	100.00	100.00	100
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	9.013.000	8.919.000	98,96	Silpa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	100
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	114.235.000	111.924.070	97,98	DAU, Pajak Rokok	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 kegiatan	4 kegiatan	100
	Total	5.357.050.897	4.959.004.996	92,57					

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 anggaran pembiayaan seluruh belanja program dan kegiatannya sebesar Rp. 5.357.050.897,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.959.004.996,- atau sebesar 92,57%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo telah memenuhi target dan realisasi kinerja serta mendukung perencanaan kinerja selama tahun 2025, dengan 2 (dua) program, antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana memiliki 4 (empat) dan 7 (tujuh) sub kegiatan telah menyerap anggaran sebesar 97,08%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan telah menyerap anggaran sebesar 91,40%.

3.4 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya

Pada tabel di bawah ini, penggunaan sumberdaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pada umumnya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 17
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%) (5/4)*100%	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%) (8/7)*100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	86,61	87,64	101,18	1.100.751.722	1.068.589.134	97,08	4,10
2.	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	0,51	0,38	74,51	4.256.299.175	3.890.415.862	91,40	16,89

Sumber Data : Data diolah

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator kinerja yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi pada indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana adalah 4,10. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dioptimalkan.

3.5 Inovasi

Selama tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo menggagas 2 inovasi yaitu Platform Situasi Siaga Bencana (FORMASI SIGAB) dan Sahabat Tanggap dan Siap Bantuan Logistik (SATGAS BATIK).

A. Platform Situasi Siaga Bencana (FORMASI SIGAB)

FORMASI SIGAB merupakan suatu platform *aggregator* yang berisi tentang berbagai informasi terkait situasi siaga bencana yang terintegrasi dan bersumber dari beberapa institusi yang berwenang dan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi; Badan Riset dan Inovasi Nasional serta beberapa satelit nasional maupun internasional yang menyediakan informasi terkait kondisi spasial. Informasi yang disediakan pada Inovasi FORMASI SIGAB terdiri atas informasi terkait kondisi cuaca, gunung api, tinggi gelombang, potensi gerakan tanah, pakiraan iklim, informasi gempa bumi dll.

Selama ini berbagai informasi tersebut berada di masing masing platform institusi yang mengampu, banyak BPBD maupun lembaga lain atau masyarakat yang telah memanfaatkan informasi tersebut namun karena seluruh informasi tersebut masih disintegrasikan sehingga belum dapat memberikan pemahaman yang signifikan. Padahal sejatinya beberapa informasi tersebut sangat berkaitan erat misalnya kondisi curah hujan di daerah hulu, periode hujan dengan kondisi tinggi pasang surut air laut dan kecepatan angin dapat menjadi penentu analisis awal apakah di daerah hilir berpotensi terjadi banjir dan bagaimana keterkaitannya dengan potensi banjir rob maupun abrasi. Hal ini yang menjadi latar belakang penyusunan inovasi ini yang diharapkan melalui inovasi ini dapat memberikan akses yang lebih mudah serta pemahaman secara spasial keterkaitan informasi khususnya pada situasi siaga bencana.

Inovasi Platform Situasi Siaga Bencana (FORMASI SIGAB) bertujuan untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kebutuhan data siaga bencana yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai peringatan dini bagi masyarakat sehingga dapat lebih aktif mengenali potensi bencana disekitar dan dapat menyusun rencana mitigasi bencana sehingga risiko bencana dapat diminimalisir. Sedangkan sasaran inovasi adalah unsur pentahelix dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yakni Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Jurnalis.

Gambar. 2
Platform Situasi Slaga Bencana (FORMASI SIGAB)



Platform berbasis Website yang berisi tentang beberapa penyajian informasi terkait data kebutuhan siaga bencana yang terintegrasi dalam satu halaman dan dapat diakses di laman https://s.id/FORMASI_SIGAB

B. Sahabat Tanggap dan Siap Bantuan Logistik (SATGAS BATIK)

Satgas Batik merupakan suatu inovasi pelayanan dimana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat petugas kaji cepat yang bertugas melaksanakan assessment, identifikasi, evakuasi maupun penanganan yang bersifat darurat yang disertai dengan kelengkapan logistik kebutuhan dasar sehingga dalam penanganan bencana kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan segera. Ketika terdapat laporan kejadian bencana yang diinformasikan kepada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) maka akan dilaksanakan analisis singkat terkait informasi awal serta kebutuhan pendukung penanganan bencana yang kemudia Satgas Batik akan melaksanakan kaji cepat dengan disertai logistik kebutuhan dasar. Logistik kebutuhan dasar yang disiagakan dalam

penanganan bencana akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu misalnya seperti Paket Makanan Siap Saji, *Sandbag*, *Yellow Line*, Perlengkapan Kebersihan, Terpal, Perlengkapan Sekolah, Sandang dan beberapa perlengkapan lain sesuai standart yang berlaku. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan prinsip prinsip pemenuhan kebutuhan dasar.

Inovasi Sahabat Tanggap dan Siap Bantuan Logistik (SATGAS BATIK) bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan bencana khususnya terkait pemenuhan kebutuhan logistik secara cepat dan tepat bagi masyarakat maupun daerah yang terdampak sehingga masa transisi darurat ke pemulihan dapat terlaksana tanpa membutuhkan waktu terlalu lama.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini merupakan sarana instropeksi diri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diharapkan dapat memberikan umpan balik dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dari indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana adalah sebesar 101,18%.
2. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun 2025 menyerap anggaran sebesar 92,57%.

4.2 Saran

Hambatan dan kendala yang terjadi tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dalam menanggulangi kendala dan hambatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo telah melakukan beberapa strategi dan upaya yang telah diimplementasikan dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dan organisasi lintas sektor terkait.

Beberapa saran bagi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPBD secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan amanah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hambatan yang seharusnya dapat dikendalikan.
3. Segera menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah habis masa berlakunya sebagai pijakan dan pedoman dalam penanggulangan bencana.
4. Segera membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai upaya-upaya dalam pengurangan resiko bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo.
5. Segera membentuk TRC Multisektor yang bertujuan untuk memudahkan dalam penanggulangan bencana sehingga penanganan bencana lebih cepat, tepat dan efektif.
6. Melakukan koordinasi internal dan eksternal secara intensif dengan instansi terkait maupun dengan lembaga/kemitraan agar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat berjalan secara optimal dan berdayaguna.
7. Mengoptimalkan sinergitas dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana.
8. Melakukan koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Probolinggo agar anggaran pada BPBD khususnya anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih ditingkatkan, juga mengajukan usulan bantuan ke BPBD Propinsi maupun Pusat (BNPB) sehingga bisa mendukung tercapainya IKU (Indikator Kinerja Utama) BPBD dan tentunya juga akan mendukung terwujudnya visi misi Kepala Daerah.
9. Perlu merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo
10. Menyusun regulasi-regulasi terkait kebencanaan
11. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan dunia usaha, lembaga maupun kemitraan dalam upaya penyelenggaraan dan penanggulangan bencana
12. Mengaktifkan kegiatan Jitu Pasma (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) diantaranya dengan menyelenggarakan Bimtek Jitu Pasma yang diikuti oleh instansi terkait untuk melakukan pendataan dan penghitungan terhadap jumlah korban, dampak maupun kerugian yang diakibatkan bencana sehingga bisa dilakukan penanganan segera dengan skala prioritas.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar dan semoga menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Namun demikian dalam Penyusunan LKj-PD ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang, oleh karena itu masukan-masukan yang positif, kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan Penyusunan LKj-PD dapat tercapai lebih baik lagi.

Probolinggo, Pebruari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720719 200312 1 003